



**Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu**

**ISSN 2656-7202 (P) ISSN 2655-6626 (O)**

**Volume 6 Nomor 1, Januari-Juni 2023**

DOI: <https://doi.org/10.35961/perada.v6i1.877>

## **DEFRAGMENTASI BUDAYA POLITIK ARISTOKRAT MELAYU: STUDI TERHADAP MANUSKRIP SEJARAH PALEMBANG**

*Komaruddin*

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
komaruddin\_uin@radenfatah.ac.id

*Ahmad Syukri*

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
Ahmadsyukri@radenfatah.ac.id

### **Abstrak**

Palembang sebagai salah satu pusat peradaban Islam di dunia Melayu pada abad ke-19. Manuskrip adalah salah satu bentuk peradaban Islam di Palembang yang masih bisa dikaji sampai saat ini. Manuskrip yang dikaji dalam riset ini adalah manuskrip *Sejarah Palembang*, manuskrip yang berisikan histori dan budaya politik penguasa Palembang pada abad ke 18 dan 19 Masehi. Isu yang dikaji dalam riset ini berkenaan dengan defragmentasi historis dan tipologi budaya politik Aristokrat Melayu abad ke XVIII – XIX M dalam Manuskrip *Sejarah Palembang*. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data utamanya hasil transliterasi Manuskrip *Sejarah Palembang* Cod.Or. 2276c dengan analisis kontekstual manuskrip. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa bentuk defragmentasi historis budaya politik aristokrat Melayu Palembang pada periode abad 18 dan 19 Masehi, yaitu: Perang Saudara, Perjanjian Politik VOC -Palembang, Perjanjian Politik, Konflik Inggris Palembang, Konflik Palembang Belanda Inggris, Konflik Palembang Belanda (Muntinghe), Konflik Palembang Belanda (De Kock). Mengenai tipologi budaya politik aristokrat Melayu yang terdeskripsi dalam manuskrip berupa; Pola Suksesi, Dinasti, Putera Raja tertua menggantikan ayahnya, Peperangan, Wasiat dari raja sebelumnya dan Penunjukan oleh pihak eksternal, Politik Pembangunan, Politik Ekonomi, Tradisi Penghormatan Perjanjian Politik, Pelanggaran Perjanjian Politik Palembang Belanda, Tragedi Loji Belanda, Diplomasi Gratifikasi, dan, Epilog Kekuasaan Aristokrat Melayu di Palembang.

**Kata Kunci:** Budaya Politik; Aristokrat Melayu; Palembang; Manuskrip.

## PENDAHULUAN

Palembang sebagai salah satu kota yang menjadi pusat kekuasaan Kedatuan Sriwijaya, Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang.<sup>1</sup> Kedatuan Sriwijaya adalah model negara maritim di Nusantara pada abad ke VII sampai abad ke – XIII<sup>2</sup>. Berdasarkan prasasti Kedukan Bukit, dapat dikatakan bahwa Palembang sebagai kota paling tua di Indonesia yang diperkirakan umurnya sekitar 13 abad lebih<sup>3</sup>.

Akhir eksistensi Kedatuan Sriwijaya sendiri bisa dilihat dari sumber berita Cina pada masa dinasti Ming, dimana pada tahun 1377 terjadinya pengambilalihan kekuasaan Kedatuan Sriwijaya oleh Kerajaan Majapahit<sup>4</sup>. Setelah dikuasai Majapahit, penguasa di Palembang adalah Ario Damar atau Ario Dilah – anak Prabu Brawijaya Sri Kertawijaya - yang berkuasa di Palembang dari tahun 1455 - 1486<sup>5</sup>. Setelah itu, Palembang diperintah oleh Dipati Karangwidara. Setelah itu Palembang mengalami era kekosongan kekuasaan.

Periode Kesultanan Palembang dideklarasikan oleh Ario Kusumo Abdul

Rahim di tahun 1653<sup>6</sup>. Wilayah kekuasaannya termasuk Lampung, Bangka Belitung dan Palembang. Kesultanan Palembang masuk masa kejayaan pada seperempat abad ke-XVIII. Sultan Muhammad Badaruddin II, mengakselerasi perdagangan timah dan lada antar daerah dan antar wilayah lintas negara lebih intensif, demi kesejahteraan rakyat Palembang<sup>7</sup>.

Corak pemerintahan Kesultanan Palembang, mencirikan kultur Melayu Jawa. Gelar dan nama-nama Jawa, masih melekat pada priyayi Palembang. Di sisi lain, keterkaitan Palembang dalam dunia Melayu sangat kuat<sup>8</sup>. Dalam Sejarah Melayu, istilah Melayu digunakan sebagai tanda perbedaan yang disediakan khusus untuk mereka bagi leluhur orang Melayu yang asalnya dari Palembang.

Dalam Pemerintahannya, elit Kesultanan Palembang dipimpin oleh Sultan dibantu oleh menteri dan didukung oleh kelompok bangsawan dan ulama kesultanan<sup>9</sup>. Kelompok elit ini adalah kaum aristokrat Kesultanan Palembang. Berdasarkan

<sup>1</sup> Jeki Sepriady and Muhamad Idris, 'Jejak Kesultanan Palembang Darussalam Di Kabupaten Banyuasin', *Kalpataru: Jurnal Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah* 3, no. 2 (2017): 56–63; Nanda Julian Utama, 'Hegemoni Maritim Dan Militer Kerajaan Sriwijaya Di Kawasan Asia Tenggara Abad 7-10 M', *Yupa: Historical Studies Journal* 5, no. 2 (2021): 78–90.

<sup>2</sup> Ahmad Berkah, 'Dampak Kekuasaan Maritim Sriwijaya Terhadap Masuknya Pedagang Muslim Di Palembang Abad VII-IX Masehi', *Medina-Te* 13, no. 1 (2017): 51–60.

<sup>3</sup> Lenni Lestari, 'Mushaf Al-Qur'an Nusantara: Perpaduan Islam Dan Budaya Lokal', *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir* 1, no. 1 (2016): 173–98.

<sup>4</sup> Sri-Bintang Pamungkas, *Ganti Rezim Ganti Sistem-Pergulatan Menguasai Nusantara* (Sri-Bintang Pamungkas, 2014).

<sup>5</sup> DEA LESTARI, Syafruddin Yusuf, and Adhitya Rol Asmi, 'Perlawanan Kesultanan Palembang Terhadap Belanda Tahun 1819-1821 (Sumbangan Materi Pelajaran Mata Kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial)' (Sriwijaya University, 2019); Sepriady and Idris, 'Jejak Kesultanan Palembang Darussalam Di Kabupaten Banyuasin'.

<sup>6</sup> Suwardi Mohammad Samin, 'Kerajaan Dan Kesultanan Dunia Melayu: Kasus Sumatera Dan Semenanjung Malaysia', *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah* 4, no. 1 (2015); Jeki Sepriady, 'Fundamentalisme Dalam Syair Perang Palembang 1819', *Kalpataru: Jurnal Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah* 5, no. 1 (2019): 19–24.

<sup>7</sup> Agus Susilo and Sarkowi Sarkowi, 'Sejarah Surulangun Sebagai Ibukota Onder Afdeling Rawas Tahun 1901-1942', *AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA* 10, no. 1 (2020): 48–66; Anastasia Wiwik Swastiwi, Sasangka Adi Nugraha, and Hendri Purnomo, *Lintas Sejarah Perdagangan Timah Di Bangka Belitung Abad 19-20* (Direktorat Jenderal Kebudayaan, 2017).

<sup>8</sup> Muhammad Lufika Tondi and Sakura Yulia Iryani, 'Nilai Dan Makna Kearifan Lokal Rumah Tradisional Limas Palembang Sebagai Kriteria Masyarakat Melayu', *Langkai Betang: Jurnal Arsitektur* 5, no. 1 (2018): 15–32.

<sup>9</sup> Yudi Armansyah, 'Dinamika Perkembangan Islam Politik Di Nusantara: Dari Masa Tradisional Hingga Indonesia Modern', *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 2, no. 1 (2017): 27–46.

pendapat <sup>10</sup> istilah aristokrat adalah kelompok orang dengan berstatus sosial tinggi, berkuasa dan berpengaruh pada struktur sosial politik.

Kemakmuran negeri Palembang dari segi perekonomian, menunjang Palembang sebagai pusat peradaban Islam di dunia Melayu pada abad ke -19 <sup>11</sup>. Konsekuensi logis sebagai tempat pembelajaran Islam, adalah melimpahnya manuskrip keagamaan Islam yang ada di Palembang saat itu. Salah satu manuskrip yang menjadi bukti ekspresi warisan budaya intelektualisme Islam nusantara di Palembang yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah manuskrip *Sejarah Palembang* Cod.Or. 2276c. Sebagian besar teks manuskrip ini berkisah histori Palembang, dan ketiadaan kolofon yang menuliskan judul secara khusus. Manuskrip ini berupa fragmentasi histori yang mendeskripsikan karakteristik budaya politik Kesultanan Palembang periode abad ke 18 - 19 M. Menurut Sumartono (2018), budaya politik ditandai dengan kesadaran politik yang kuat pada sebuah sistem masyarakat multi etnis. Sistem budaya politik mengandung tiga aspek, yaitu struktur, pemerintah dan aturan hukum <sup>12</sup>.

Kajian tekstual manuskrip jamak dilakukan, namun dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis kontekstual Manuskrip *Sejarah Palembang* berkenaan dengan budaya politik aristokrat Melayu Palembang abad ke XVIII – XIX M. Kajian yang dibahas dalam artikel ini adalah defragmentasi historis dan tipologi budaya politik Aristokrat Melayu abad ke XVIII –

XIX M dalam Manuskrip *Sejarah Palembang* Cod.Or. 2276c.

Adanya hasil penelitian ini untuk menginisiasi konsep pengetahuan tentang budaya politik aristokrat Melayu abad ke XVIII – XIX M, dari perspektif kajian kontekstual manuskrip *Sejarah Palembang* Cod.Or. 2276c. Secara metodologis penelitian ini memandang analisis kontekstual manuskrip dapat menghubungkan lebih banyak data dalam manuskrip menjadi informasi historis politis sebagai bagian dari peradaban Islam di Nusantara yang unik, yang berlangsung di Palembang pada abad ke 18 – 19 M.

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan riset yang lain mengenai budaya politik aristokrat Melayu yang dari perspektif kajian kontekstual manuskrip *Sejarah Palembang*. Sebagai masukan model analisis kontekstual manuskrip sebagai menghidupkan analisis manuskrip sebagai khazanah unggulan Islam Nusantara di Indonesia.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penulis menggambarkan keadaan, kondisi atau peristiwa sosial politik yang mengkaji Budaya Politik Aristokrat Melayu berdasarkan teks dalam manuskrip *Sejarah Palembang* Ditinjau dari bidang ilmu, riset ini merupakan kajian bidang ilmu sejarah politik. Jika dilihat dari jenis data dan proses penelitian, penelitian ini adalah Penelitian kualitatif memerlukan data tulisan dan analisis, untuk mendapatkan interpretasi data yang akurat (Zuriah, 2006: 92). Data yang akan dianalisis adalah data teks dalam manuskrip *Sejarah Palembang*, yang dikaji secara kontekstual untuk memahami budaya politik aristokrat Melayu di Palembang. Analisis kontekstual terhadap manuskrip yang sudah digitalisasi. Analisis kontekstual manuskrip secara umum untuk mengkaji kontekstual sosial sebuah manuskrip, yang berkemungkinan berkaitan dengan kajian manuskrip lain yang lebih luas. Untuk mengkaji kontekstual sebuah manuskrip, tidak harus dari manuskrip yang otentik, bisa

<sup>10</sup> Paul Magdalino, 'Court Society and Aristocracy', *A Social History of Byzantium* 216 (2009).

<sup>11</sup> Berkah, 'Dampak Kekuasaan Maritim Sriwijaya Terhadap Masuknya Pedagang Muslim Di Palembang Abad VII-IX Masehi'; Raudatun Jannah, 'Peran Tarekat Sammaniyah Dalam Perang Menteng Melawan Kolonial Belanda Di Palembang', *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2017): 119–31.

<sup>12</sup> Steve G. Chr Gaspersz, 'Masuk Melayu Menegosiasikan Islam Dan Kemelayuan Di Malaysia', *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKN Dan Sosial Budaya* 1, no. 1 (2017).

memanfaatkan edisi digital sebuah manuskrip. Apapun catatan dalam manuskrip layak untuk dikaji kontekstual.

## PEMBAHASAN

### 1. Defragmentasi Historis Budaya Politik Aristokrat Melayu Palembang

#### a. Perang Saudara

Dalam Manuskrip ini menyajikan suasana pertempuran epik, dua saudara yang tadinya berhubungan baik, namun karena permasalahan yang mungkin dianggap biasa bahkan sepele, namun menjadi awal sengketa yang berkepanjangan. Perseteruan antara Sultan Anom Muhammad Alimudin dan adiknya Pangeran Jayawikrama. Dimana salah satu pemicu utama konflik ini adalah karena memperebutkan seorang perempuan yang sama. Perang saudara ini berlangsung selama masa pemaksaan peralihan kekuasaan Sultan Anom Alimudin dari pamannya, Sultan Agung Komarudin Sri Teruno, sekitar tahun 1724 M. Catatan perang saudara ini ditulis dalam Manuskrip *Sejarah Palembang* pada halaman 4, 9, 10, 11, 12, dan 13.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Sultan Anom untuk membunuh Pangeran Jayawikrama, serta untuk menghindari konflik yang berkepanjangan, akhirnya Pangeran Jaya Wikrama memutuskan untuk pindah ke tempat lain yang bernama Kampung Kadipan bersama rakyatnya. Sementara di kampunya, Sultan Anom berjaga keras, siang dan malam tidak boleh terlena. Apabila ada rakyat dari Kampung Kadipan berjalan di kampunya, maka akan dibunuh oleh rakyatnya. Maka dari itu, Pangeran Jaya Wikrama juga berjaga-jaga di kampunya dan tidak perlu lagi menghadap Sultan Anom agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Sultan Agung pada tanggal 15 Maret 1724 wafat, dan lima hari kemudian para bangsawan memilih Pangeran Jayawikrama sebagai penguasa, memasangnya dengan gelar Sultan Mahmud Badaruddin di

hadapan kaum priyayi Palembang tinggi dan rendah dan kepala interior atau peroatin.

#### b. Perjanjian Politik VOC -Palembang

Dalam Manuskrip dideskripsikan mengenai perjanjian Politik antara Pangeran Jayawikrama dengan VOC Belanda, dimana perjanjian tersebut dilatarbelakangi dengan bantuan Belanda kepada Pangeran Jayawikrama untuk mengalahkan kakaknya, Sultan Anom Alimudin. Semua ditulis dalam Manuskrip *Sejarah Palembang* hal 6, 7, dan 8

Adapun kontrak perjanjian yang dibuat antara Pangeran Jaya Wikrama dengan Belanda antara lain:

1. Pangeran Jaya Wikrama harus membayar empat puluh laksa ringgit dan delapan puluh budak (empat puluh budak laki-laki dan empat puluh budak perempuan) kepada Kompeni saat ia menjadi penguasa.
2. Semua timah yang ditambang di Bangka dijual kepada perusahaan.
3. Gading, cula, dan sahang tidak boleh dijual di tempat lain, semuanya harus dijual kepada Kompeni.
4. Perusahaan adalah satu-satunya yang diizinkan untuk menetap di Palembang dan membangun benteng.
5. Tidak ada kapal perang yang diizinkan di Palembang, kecuali kapal milik perusahaan.
6. Setiap tahun armada kapal akan dikirim ke Batavia sarat dengan timah. Ini diselesaikan dengan harga yang disepakati.

#### c. Konflik Inggris Palembang

Palembang pada periode pada abad ke-19 menghadapi konflik besar dengan Inggris. Kekuatan armada perang Inggris, begitu menggetarkan Sultan Palembang. Narasi tentang awal mula konflik dan fragmentasi historis konflik dengan Inggris, ditulis dalam Manuskrip *Sejarah Palembang*

pada halaman 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 dan 39<sup>13</sup>.

Pada tahun 1821 situasi menjadi menjadi berubah karena terjadi perebutan keraton Palembang oleh pemerintah kolonial Belanda. Semenjak saat itulah, secara berangsur-angsur peran kesultanan dan para bangsawan merosot karena keraton pun ikut dalam dilenyapkan dan pemerintah kolonial Belanda mengambil ahli kekuasaan. Maka dari situ yang dimana pangeran Syarif Muhammad membuat dirinya bersekutu dengan Inggris.

Awal mulanya jenderal Raffles serta mendengarkan pengaduan dari pangeran Syarif Muhammad dengan mengatakan segala hal bahwa di Palembang sudah habis semuanya. Meskipun begitu Betawi sudah dikeluarkan dan di gantikan oleh Inggris. Maka jenderal Raffles itu pun terkejut pada suatu hari jenderal Raffles keluar dari kantor dengan membicarakan negeri Betawi, ia memanggil tumenggung dari utusan Palembang itu. Pada saat datang ia di periksa dari utusan untuk mengaku bicara holanda-holanda Palembang itu. Maka dari ada dua utusan yang di ambil kerisnya lalu di bawah ke kapal perang ditutup keduanya. Dan perahu utusan dari Palembang tersebut dirampas secara paksa bahkan di buang talinya. Maka dari itu masa saat jenderal Raffles untuk menyuruh kepada jenderal galispi agar dapat membawa angkatan masuk Palembang. Dan utusan Palembang itu semua di bawa ke dalam kapal tempat jenderal galispi pangeran Syarif Muhammad itu juga. Maka dari itu jenderal pergi ke Palembang dengan membawa beberapa kapal dan perahu lainnya untuk menjadikan alat perang. Berdasarkan perjanjian Tuntang tanggal 18 September 1811 Maschi yang dibuat antara Belanda dan

Inggris<sup>14</sup>. Belanda menyerahkan Palembang kepada Inggris, karena Palembang di samping Timor dan Makasar oleh Belanda dihitung sebagai daerah takluk pulau Jawa. Utusan Inggris agar menerima warisan dari Belanda tetapi dengan tegas ditolak oleh Sultan Mahmud Badaruddin II. Untuk memaksa kehendaknya menguasai Palembang, Raffles mengirim ekspedisi militer pada tanggal 20 Maret 1812 Maschi.

Setelah dengan segala kekuatan dan upaya dalam mengadakan perlawanan terhadap angkatan perang Inggris di kota. Sultan Mahmud Badaruddin II menghindari ke daerah pedalaman agar bisa mengatur perang gerilya bersama rakyat. Perang gerilya dipimpin langsung oleh Sultan Mahmud Badaruddin II di daerah pedalaman, sehingga memaksa Inggris harus mengakui keunggulan Sultan dan mengakui ketetapannya sebagai Raja.

#### **d. Konflik Palembang Belanda Inggris**

Pada masanya, Palembang terlibat dalam pusaran konflik internal dan eksternal sekaligus. Antara Palembang, Belanda dan Inggris. Narasi dalam manuskrip Sejarah Palembang mengenai konflik tiga negara ini dalam halaman 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 dan 53.

Keluhan, yang diajukan oleh penduduk yang bersangkutan dan penduduk Inggris Benkoelen kepada perwakilan otoritas kolonial di Palembang, tetap tanpa hasil. Pemerintah Belanda yang impoten, jika siap untuk ikut campur dalam politik dalam negeri, tentu tidak mampu melakukannya. Apalagi Residen Heynes lebih mementingkan kepentingan pribadinya ketimbang dengan kesejahteraan Palembang. Dia bersalah atas kerusakan ekstensif dan, setelah penyelidikan atas

<sup>13</sup> Magdalino, 'Court Society and Aristocracy'; Endang Rochmiatun, 'Elit Lokal Palembang Dan Polemik Kebangkitan Kesultanan Palembang: Menggali Sumber Sejarah Melalui Manuskrip', *Manuskript* 8, no. 1 (2018): 107–27.

<sup>14</sup> Leni Mastuti Mubarakah, 'Palembang Pada Masa Penjajahan Inggris (1811-1816): Hegemoni Inggris Atas Kesultanan Palembang Darussalam', *Soeloe Melajoe: Jurnal Peradaban Melayu Islam* 1, no. 2 (2022): 51–57.

praktiknya, adalah komite Dewan Keuangan, yang terdiri dari R. Kandang a Hijau dan J. du Puy, dipecat. Dewan kemudian diamati oleh komite ini yang berlaku mulai 29 Juni 1817. Du Puy kembali 16 Desember karena alasan kesehatan kembali ke Batavia, di mana Coop terus mengurus perkara sendirian untuk mengantisipasi kedatangan Bapak Herman Wamer Muntinghe, yang sudah dengan keputusan Komisaris Jenderal dd. Pada 27 Oktober 1817, ia dibebastugaskan dari posisinya sebagai presiden Dewan Keuangan dan diangkat sebagai komisaris Palembang dan Bangka. Muntinghe telah memegang beberapa jabatan tinggi dalam pemerintahan tertinggi di Batavia sejak tahun 1804 berturut-turut di bawah Wiese dan Daendels dan setelah jatuhnya Jawa oleh Raffles, yang sangat menghargainya adalah anggota perguruan tinggi pemerintah tertinggi Dewan Hindia. Namun, pada tahun 1813, ia menarik diri dari kelompok pemerintah. Setelah pemulihan otoritas Belanda, ia memasuki kembali kehidupan publik, pertama sebagai presiden Dewan Kehakiman, kemudian sebagai presiden Dewan Keuangan<sup>15</sup>

### 5. Konflik Palembang Belanda (Muntinghe)

Sejarah hubungan Palembang dan Belanda, mengalami pasang surut. Kadang penuh kedamaian dan relasi saling menguntungkan, namun disatu sisi potensi konflik selalu ada. Nukilan konflik Belanda dan Sultan Palembang, terutama dengan Jenderal Muntinghe, dicatat dalam

manuskrip *Sejarah Palembang* pada halaman 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 dan 62<sup>16</sup>.

Pada tanggal 30 Juli, situasi di Palembang dibahas di tempat dan ekspedisi militer di bawah komando tertinggi komandan angkatan laut sendiri diputuskan. Ditetapkan bahwa ekspedisi harus berangkat selambat-lambatnya pertengahan Agustus (bahkan sebelum fajar monsun barat) dan bahwa Muntinghe akan mengalami perjalanan. Yang terakhir mengeluarkan saran tertulis pada hari berikutnya, menggambarkan potensi perang dan pertahanan Palembang dan juga membuat rekomendasi untuk perang yang sukses melawan musuh. Beberapa hari kemudian ia juga memberikan pandangannya secara rinci sehubungan dengan pendudukan tahta sultan, menyimpulkan bahwa Badaruddin harus digulingkan dan disarankan untuk menunjuk sebagai pewaris takhta putra ketiga sultan muda, Pangeran Jayaningrat, yang telah mengikuti ayahnya di pengasingan ke Jawa pada tahun berikutnya.

### 6. Konflik Palembang Belanda (De Kock)

Nukilan konflik Belanda dan Sultan Palembang, dalam hal ini Jenderal De Kock dicatat dalam manuskrip *Sejarah Palembang* pada halaman 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 dan 72. Di bawah komando Komandan Angkatan Darat, Jenderal Mayor De Kock, ekspedisi berangkat setelah inspeksi oleh Gubernur Jenderal pada tanggal 9 Mei di Batavia, terlepas dari kenyataan bahwa kolera baru-baru ini pecah di Jawa dan epidemi ini telah menyebar di antara pasukan; itu akan menelan biaya ekspedisi lebih dari seratus orang. Ini memang telah menjadi usaha berskala sangat besar: armada empat puluh tujuh kapal perang yang lebih besar dan lebih kecil, enam belas kapal pengangkut dan puluhan prauwen, dengan

<sup>15</sup> Farida Farida, 'Konflik Politik Di Kesultanan Palembang (1804-1821)', *Jurnal Sejarah Lontar* 4, no. 2 (2007): 15–23; Michiel Otto Woelders, 'Het Sultanaat Palembang 1811-1825: Een Bijdrage Tot de Studie van de Maleise Geschiedschrijving', in *Het Sultanaat Palembang 1811-1825* (Brill, 2012).

<sup>16</sup> Rochmiatun, 'Elit Lokal Palembang Dan Polemik Kebangkitan Kesultanan Palembang: Menggali Sumber Sejarah Melalui Manuskrip'.



persenjataan empat ratus empat belas keping artileri angkatan laut dan delapan belas artileri lapangan dan delapan belas keping lapangan dan dengan awak 2580 orang angkatan laut dan 1679 tentara. Setelah perjalanan yang sukses, armada berada di pidato Muntok pada 13 Mei dan dua minggu kemudian di atas bank di Sungsang.

## 2. Tipologi Budaya Politik Aristokrat Melayu abad 18 dan 19

### a. Pola Suksesi

Pada halaman awal Manuskrip *Sejarah Palembang* mendeskripsikan model suksesi di Kesultanan Palembang. Lembar Manuskrip yang berbicara mengenai suksesi dapat kita lihat pada halaman 1, 2, 14, 16, 18, 22, 36, 42, 63, 64 dan 65. Hasil Transliterasi Manuskrip *Sejarah Palembang*, menunjukkan secara general, pola suksesi yang berlaku di Kesultanan Palembang Merujuk kepada manuskrip, pola suksesi Kesultanan Palembang ada beberapa bentuk yaitu :

1. Dinasti, Putera Raja tertua menggantikan ayahnya.
2. Peperangan atau konflik bersenjata
3. Wasiat dari raja sebelumnya
4. Penunjukan oleh pihak eksternal.

### b. Politik Pembangunan

Konsep politik Pembangunan dalam Manuskrip *Sejarah Palembang* dapat dilihat pada halaman 3, 16 dan 18. Dalam imajinasi populer dan ilmiah, mungkin manifestasi yang paling sering budaya dalam diskusi tentang politik pembangunan adalah melalui saluran etnisitas. Berbicara mengenai Melayu Palembang sebagai kelompok masyarakat yang berdagang mempunyai argumen dengan tampaknya daya tarik intuitif, misalnya yang lebih "beragam secara etnis" (yaitu, secara budaya Melayu Palembang yang heterogen) dimana populasi masyarakat yang heterogen tadi akan berjuang untuk membangun koalisi politik yang luas dan tahan lama dan dengan demikian kecil kemungkinannya untuk menikmati

kemakmuran ekonomi telah lama menjadi ciri khas perdebatan kebijakan pembangunan, tetapi dalam beberapa tahun terakhir munculnya semakin canggih kumpulan data telah memungkinkan proposisi tersebut untuk diuji dan disempurnakan secara resmi<sup>17</sup>. Upaya untuk menafsirkan dan menanggapi dengan cara yang konstruktif terhadap perdebatan tentang hubungan antara keragaman etnis, dinamika politik, dan hasil pembangunan menghadapi dua jenis masalah abadi: pengukuran dan teori. Masalah pengukuran relatif mudah jika asumsi yang mendasarinya adalah bahwa etnis dan ras adalah pada dasarnya kategori demografis tetap dan koheren. Yang pasti, kemungkinan besar akan ada kekhawatiran yang sah tentang bagaimana tepatnya mengklasifikasikan masyarakat melayu Palembang yang heterogen yang menjadi salah satu faktor pendukung politik pembangunan yang dilaksanakn oleh para Sultan Palembang.

### C. Politik Ekonomi

Perkembangan sebuah negara didukung oleh perkembangan ekonomi, termasuk pada kesultanan Palembang. Kegiatan perdagangan komoditas yang menguntungkan secara ekonomis antar negara, terutama komoditas yang menguntungkan dipasar global saat itu. Perjanjian dagang biasanya satu paket dengan perjanjian politik. Dalam manuskrip *Sejarah Palembang* fragmentasi kegiatan politik ekonomi, terdeskripsikandalam halaman 15, 17, dan 23. Pusat ekonomi dan administrasi kerajaan Palembang, di tepi kanan Musi, dekat anak sungai, Sungai Aur, dan secara diagonal di seberang kompleks kraton di tepi kiri Musi, adalah pemukiman Belanda, yang dibuat dari pos perdagangan permanen Perusahaan India Timur, yang didirikan di sana pada tahun 1662. Kontak perdagangan

<sup>17</sup> Nicolas van de Walle, 'The Party Paradox: A Comment Nicolas van de Walle (Cornell) February 20, 2018', *Democratization* 25, no. 6 (2018): 1052–62.

dengan Perusahaan, yang sudah bertanggung dari tahun 1619, telah memperoleh karakter yang lebih permanen selama bertahun-tahun. Antara tahun 1641 dan 1791, serangkaian "perjanjian khidmat" disimpulkan mengenai pasokan lada dan kemudian - setelah penemuan sekitar tahun 1710 dari kejadian timah di pulau Bangka di bawah Palembang - juga dari timah. Monopoli Perseroan yang ditetapkan dengan demikian berarti bahwa Palembang berkewajiban untuk memasok Perusahaan dengan total produksi lada dan timah di negara tersebut terhadap Perusahaan, yang telah tentukan, tentu saja harga non-komersial. Tak perlu dikatakan bahwa monopoli ini telah banyak dihindari. Terutama dalam dekade terakhir abad kedelapan belas, ketika posisi Compagnie d'Inde telah melemah, bahwa ia tidak lagi mampu menegakkan ketaatan terhadap ketentuan monopoli, penyelundupan meningkat seiring dengan tangan.

#### **d. Tradisi Penghormatan Perjanjian Politik**

Dalam menghormati perjanjian Politik, aristokrat melayu Palembang ditulis dalam Manuskrip *Sejarah Palembang* halaman 21 Maka selesailah antara Palembang dengan Betawi. / Tiada sesuatu apa-apa permintaan dari Palembang yang pantas Kompeni turut dan apa-apa permintaan dari Kompeni yang pantas Sultan Palembang turut. Demikianlah pada tiap-tiap tahun utusan itu di Palembang membaca surat perjanjian di hadapan seisi negeri, siapa suka dengar. Waktu mengarak surat dari Betawi itu terlalu ramainya, pada tiap-tiap tahun masang meriam dan senapang beberapa banyak di hadapan Raja Palembang dengan petor. Berhimpunlah sekalian punggawa menteri dan orang yang pangkat besar didalam negeri Palembang, sama mengadap di pamarakan besar, makan dan minum. Demikianlah pada tiap-tiap tahun. Dan tempat kota Kompeni itu orang panggil loji pada zaman itu atawa orang panggil gudang

Holanda. Demikianlah jikalau Raja Palembang jalan berperahu ke hilir, maka loji Kompeni itu masang meriam hormat kepada Sultan Palembang itu. Dan jika Sultan Palembang berperahu ke hulu, tiada masang meriam di loji Kompeni, sebab tiada kelihatan dari loji Kompeni itu. Selama-lamanya aturan begitulah sudah didalam kontraknya. Kompeni dengan Raja di Palembang bertambah-tambah berkasih-kasih.

#### **e. Pelanggaran Perjanjian Politik Palembang Belanda**

Dalam Manuskrip *Sejarah Palembang* halaman 24, 25, 26, 27, dan 28 dituliskan mengenai pelanggaran perjanjian politik oleh Sultan Palembang kepada Belanda, dengan mengakibatkan terjadinya tragedi Loji. Telah sampai di Palembang, disampaikannya kepada Sultan Palembang segala berita Inggris itu. Maka Sultan di Palembang itupun bertambah-tambah jaga negeri. Di Sungsang beberapa menteri yang jaga dan di Mentokpun beberapa pula menteri menunggu di sana berganti-ganti; kalau ada perahu Inggris dan perahu Belanda dari Betawi, Sultan hendak segera tahu. Adapun mupakatkan segala kepala kepala bicara di Palembang: Akan dikeluarkan Kompeni di Palembang itu semuanya menurut bagaimana bicara Inggris, itu baik kalau Betawi dapat oleh Inggris. Kalau tidak dapat negeri Betawi oleh Inggris jadi tiada baik, kerana Belanda sahabat Palembang selama-lamanya. Dan melainkan kita nantikan siapa juga yang menang akan perang Betawi itu

#### **f. Tragedi Loji Belanda**

Tragedi Loji ini adalah awal mula dari pelanggaran perjanjian politik Sultan Palembang dan VOC Belanda<sup>18</sup>, kisah singkatnya bisa dilihat narasinya dalam

<sup>18</sup> Ellya Roza, *Sejarah Perjuangan Tengku Bunwang Menumpas Belanda Di Pulau Guntung Siak (1746-1760)* (Aswaja Pressindo, 2016).



Manuskrip Sejarah Palembang halaman 28. Dalam menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi, di dalam Kota Palembang sendiri telah diperkuat dengan didatangkannya rakyat uluan (Mata gawe) dilengkapi juga dengan pesirahnya. Kabar yang paling dinanti adalah mengenai kekalahan Jansens di Tutang dengan jatuhnya Kota Batavia ke tangan Inggris, Said Zain Bafakih merupakan seseorang yang memberikan informasi tersebut kepada Sultan. Posisi atau kedudukan masyarakat Belanda di Sungai Aur Palembang tidak menerima bantuan ataupun dukungan dari pemerintah pusat yang ada di kota Batavia, sebab diakibatkan oleh jatuhnya Batavia ke tangan Inggris. Pada kala itu juga Sultan menjadi pemimpin sebagai kepala penguasa tradisional.

Misi pada daerah tersebut ialah untuk menyudahi dan mengakhiri segala bentuk doktrik ataupun pengaruh dari yang bertempat di Sungai Aur. Maka dari itu, muncullah ide yang cerdas yakni Sultan bersiasat mengundang J. Groenhof van Woortman (residen) ke tempatnya (istana) dalam kegiatan ramah-tamah. Pertemuan tersebut menjadikan hulubalang Palembang menyerbu, menyerang, mendapati, dan menduduki loji yang ada di Sungai Aur. Belanda sendiri ada sekitar 24 orang pria wanita dan anak-anak. Sedangkan, sebanyak 63 orang serdadu Jawa-Belanda dilucuti senjatanya serta ditawan. Kecuali, satu orang Indo Belanda yang dikenal dengan nama Willem van De Wateringbuys yang berhasil melarikan dirinya bersama dengan saudara perempuannya. Hal ini dilakukan yakni menyamar menjadi bagian dari penduduk setempat. Namun, tak lama dari itu mereka ditangkap dengan lokasi berada di daerah seberang ilir, Sultan pun memaksanya untuk menjadi seorang muslim. Pada akhirnya dibuang ke Dusun Burai.

#### **g. Diplomasi Gratifikasi**

Proses diplomasi dengan model gratifikasi dilakukan Sultan Palembang, hal tersebut dapat dilihat dari narasi dalam

manuskrip *Sejarah Palembang* pada halaman 40. Setelah Mayor Robison itu sampai di Muara Rawas, maka bertemulah dengan Sultan Ulu di bénteng di Muara Rawas, dengan masang bedil, makan dan minum terlalu ramainya. Adapun segala peria dan menteri yang daripada bénteng Palembang itu disuruh oleh Mayor Robison itu minta ampun kepada Sultan Ulu. Sultan Ulu Mahmud Badaruddin dari Muara Rawas dengan rakyatnya ke Palembang. Maka Sultan Mahmud Badaruddin yang dari hulu itupun masuklah kedalam kot a besar itu, sebab sudah dibeli empatpuluh laksa ringgit dan Sultan yang muda Ahmad Najamuddin berpindah duduk di kot a lama dengan sekalian rakyatnya. Adapun méjir yang menjemputi Sultan di Muara Rawas, diberinya pers é n limaribu ringgit.

Setelah selesailah Sultan Mahmud Badaruddin itu duduk didalam kota besar itu, maka Méjir Rabsun itu pergi ke Betawi, membawa Pangéran Ratu dan Pangéran Adimenggala, anak Sultan Tua, menerima kasih dapat damai itu lagi diampuni Inggeris. Maka Pangéran Ratu dengan Pangéran Adimenggala itupun pergilah ke Betawi dengan beberapa peria dan menteri temannya itu, dibawa oleh Mayor Robison bersama-sama utusan dari Sultan yang muda Ahmad Najamuddin itu.

Maka telah datang ke Betawi, maka Pangéran Wiradiraja, suruhan daripada Sultan Muda Ahmad Najamuddin itu, memberitahu kepada Jéndral Galispie yang dia diturunkan daripada kota besar, dipindahkan di kota lama tiada dengan suatu kesalahan dan Sultan Ulu kembali naik kerajaan di Palembang. Maka Jéndral Rafles itupun terkejut siapa yang punya aturan. Maka nyatalah Mayor Rabison punya menerima uang harga kota itu empatpuluh laksa ringgit. Jéndral Rafles tiada suka, Mayor Robison itupun dipenjara di Betawi empat jam lamanya

Badaruddin membawa regalia dinasti, bahkan ada dalam pikirannya tempatkan sedikit otoritas. Oleh karena itu

dapat dimengerti bahwa Mayor William Robison, yang telah menggantikan Meares sebagai penduduk dan yang menganggap Raffles, dengan siapa ia telah berkonflik beberapa kali dalam karir resminya, sebagai pelaku utama dalam pembunuhan Belanda, tidak tetap tidak peka terhadap kemajuan sultan lama untuk dikembalikan ke martabatnya - jika perlu terhadap pembayaran sejumlah besar uang. Atas dasar pemahaman yang benar tentang keseimbangan kekuatan tetapi bertentangan dengan instruksinya, Robison menahan diri dari tindakan militer terhadap markas besar Badaruddin yang sangat dibentengi di Muara Rawas.

#### **h. Epilog Kekuasaan Aristokrat Melayu di Palembang**

Dalam manuskrip ditulis juga fase akhir kesultanan Palembang, dalam halaman 73, 74, 75, 76, 77, 78 dan 79. Tiada berapa lamanya dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maka suatu ketika Sultan itupun menghimpunkan rakyat mengamuk kota, kepada tahun seribu duaratus empatpuluh, betul kepada sembilan- likur hari bulan Rabiul-awal, malam Isnin, pukul empat fajar. Dan kepada waktu itu juga Sultanpun undur dengan segala rakyatnya itu, bertahan di Suakbata, di tempat Suhunan Husin Dia'uddin itu. Dan rakyat Sultan yang mati diluar kota masa malam mengamuk itu: Pangéran Citra Putang, kedua Radén Gubir, ketiga Khatib Jabaruddin, keempat nama Si Luncuk. Adapun malam Sultan / mengamuk itu Pangéran Dipati Muda dengan Pangéran Dipati Jayaningrat ada dalam kota dan Pangéran Bupati Panembahan undur di Kertapati membawa anak-isterinya. Dan pada siang hari itu Suhunan Husin Dia'uddinpun turunlah; pada malam yang kedua pergi ke Betawi, diséwakan oléh Résident Rinis di koci Masagus Caguk. Dan kepada masa itu tiada ada kapal perang di Palembang. Maka Suhunan Husin Dia'uddin itu mintarlah ke Betawi dengan sekalian rakyatnya.

Adapun Sultan yang mengamuk itu tiada mau mengikut, lari dengan rakyatnya mudik ke hulu Musi, ngimpunkan rakyat di Muara Beliti. Maka Pangéran Dipati Muda, saudara Suhunan itu juga, disuruh résident mudik membawa punggawa menteri dengan alat senjata. Dan janji: jikalau Sultan itu dapat, maka Pangéran Dipati Mudalah yang jadi sultan di Palembang. Maka perahu-perahu Suhunan dan Sultan itupun terserahlah kepada Pangéran Dipati itu; gajihnya seribu rupiah dan Pangéran Dipati Jayaningrat seribu rupiah. Maka Pangéran Dipati Muda itupun mudiklah dengan peria dan menteri dengan alat senjatanya lengkap.

Tiadalah berapa lamanya, maka sampailah di ilir dusun Muara Beliti, tempat Sultan itu. Maka Sultanpun tiada mau bicara damai, maka dinaiki oléh Pangéran Dipati, dari hutan seberang dusun itu dipasang dengan bedil. Dan beberapa kali dipasang itu, maka Sultan itupun terkejut, lalu berlari dengan segala rakyatnya lari ke hulu membuat bénténg, di ulu Ogan satu dan di ulu Lematang satu, serta ngimpunkan orang Pasemah dan segala marga dengan alat senjatanya lengkap. Maka Pangéran Dipati Muda itupun sakit, lalu milir segala angkatan dari Palembang itu. Maka telah waras Pangéran Dipati Muda itu, maka mudik pula angkatan Pangéran Dipati dari Palembang itu dengan peria dan menteri, beberapa banyak perahunya dengan alat senjatanya lengkap. Maka Kirangga Wirasentika mudik pula, lain angkatan dari batangari lain. Maka Pangéran Dipati Muda itupun belum berapa jauh angkatannya mudik, maka sakit pula; milir, lalu mati di rantau.

Syahdan maka Rangka Wirasentika itupun bertahan di dusun Limbun. Disuruh Sultan langgar kepada Pangéran Jayadilaga; namanya masagus, diangkat Sultan nama kemas di ulu itu juga. Maka angkatan Pangéran Jayadilaga / itupun bertemulah dengan angkatan Kirangga Wirasentika, lalu perang sama-sama di darat terlalu ramainya. Maka Pangéran Jayadilaga itupun ken a

peluru kepalanya, jatuh, lalu mati. Dan banyak juga temannya itu mati. Maka semuanya rakyat Sultan- pun lari. Tinggallah Sultan itu dengan Pangéran Puspadi-prana yang dipanggil orang Palembang Pangéran Cingot itu; sebagai perantara bicara, makanya Sultan jadi mengamuk kota itu. Setelah rakyat sudah habis lari itu, maka Sultan dan Pangéran Cingot dan Masagus Abdul jamil lalu dari Ogan ke Palembang menyerahkan diri kepada Kompeni. Masa itu komisariss sudah ada di Palembang. Sultan lagi di ulu negeri, disuruhnya temenggung polisi menjemput Sultan itu dengan perahu Tunggul Kuning. Maka Sultanpun setelah sampai ia ke Palembang, naiklah ke kapal perang. Diberi makan pagi soré dari Kompeni. Temenggung Astramenggala yang mengantarkan makanan Sultan itu pagi soré dengan sepertinya adat raja-raja Palembang. Demikianlah kira-kira tujuh bulan lamanya Sultan Ahmad Najamuddin itu di kapal perang di Palembang itu, maka keluarlah dari Palembang di kapal perang itu juga, dibawa di negeri Bandan.

## PENUTUP

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa bentuk defragmentasi historis budaya politik aristokrat Melayu Palembang pada periode abad 18 dan 19 Masehi, yaitu: Perang Saudara, Perjanjian Politik VOC - Palembang, Perjanjian Politik, Konflik Inggris Palembang, Konflik Palembang Belanda Inggris, Konflik Palembang Belanda (Muntinghe), Konflik Palembang Belanda (*De Kock*). Mengenai tipologi budaya politik aristokrat Melayu yang terdeskripsi dalam manuskrip berupa; Pola Suksesi, Dinasti, Putera Raja tertua menggantikan ayahnya, Peperangan, Wasiat dari raja sebelumnya dan Penunjukan oleh pihak eksternal, Politik Pembangunan, Politik Ekonomi, Tradisi Penghormatan Perjanjian Politik, Pelanggaran Perjanjian Politik Palembang Belanda, Tragedi Loji Belanda, Diplomasi Gratifikasi, dan, Epilog

Kekuasaan Aristokrat Melayu di Palembang.  
[]

## REFERENSI

- Armansyah, Yudi. 'Dinamika Perkembangan Islam Politik Di Nusantara: Dari Masa Tradisional Hingga Indonesia Modern'. *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 2, no. 1 (2017): 27–46.
- Berkah, Ahmad. 'Dampak Kekuasaan Maritim Sriwijaya Terhadap Masuknya Pedagang Muslim Di Palembang Abad VII-IX Masehi'. *Medina-Te* 13, no. 1 (2017): 51–60.
- Farida, Farida. 'Konflik Politik Di Kesultanan Palembang (1804-1821)'. *Jurnal Sejarah Lontar* 4, no. 2 (2007): 15–23.
- Gaspersz, Steve G. Chr. 'Masuk Melayu Menegosiasikan Islam Dan Kemelayuan Di Malaysia'. *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKN Dan Sosial Budaya* 1, no. 1 (2017).
- Jannah, Raudatun. 'Peran Tarekat Sammaniyah Dalam Perang Menteng Melawan Kolonial Belanda Di Palembang'. *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2017): 119–31.
- LESTARI, DEA, Syafruddin Yusuf, and Adhitya Rol Asmi. 'Perlawanan Kesultanan Palembang Terhadap Belanda Tahun 1819-1821 (Sumbangan Materi Pelajaran Mata Kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial)'. Sriwijaya University, 2019.
- Lestari, Lenni. 'Mushaf Al-Qur'an Nusantara: Perpaduan Islam Dan Budaya Lokal'. *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir* 1, no. 1 (2016): 173–98.
- Magdalino, Paul. 'Court Society and Aristocracy'. *A Social History of Byzantium* 216 (2009).

- Mubarokah, Leni Mastuti. 'Palembang Pada Masa Penjajahan Inggris (1811-1816): Hegemoni Inggris Atas Kesultanan Palembang Darussalam'. *Soeloeh Melajoe: Jurnal Peradaban Melayu Islam* 1, no. 2 (2022): 51–57.
- Pamungkas, Sri-Bintang. *Ganti Rezim Ganti Sistim-Pergulatan Menguasai Nusantara*. Sri-Bintang Pamungkas, 2014.
- Rochmiatun, Endang. 'Elit Lokal Palembang Dan Polemik Kebangkitan Kesultanan Palembang: Menggali Sumber Sejarah Melalui Manuskrip'. *Manuskripta* 8, no. 1 (2018): 107–27.
- Roza, Ellya. *Sejarah Perjuangan Tengku Buwang Menumpas Belanda Di Pulau Guntung Siak (1746-1760)*. Aswaja Pressindo, 2016.
- Samin, Suwardi Mohammad. 'Kerajaan Dan Kesultanan Dunia Melayu: Kasus Sumatera Dan Semenanjung Malaysia'. *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah* 4, no. 1 (2015).
- Sepriady, Jeki. 'Fundamentalisme Dalam Syair Perang Palembang 1819'. *Kalpataru: Jurnal Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah* 5, no. 1 (2019): 19–24.
- Sepriady, Jeki, and Muhamad Idris. 'Jejak Kesultanan Palembang Darussalam Di Kabupaten Banyuasin'. *Kalpataru: Jurnal Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah* 3, no. 2 (2017): 56–63.
- Susilo, Agus, and Sarkowi Sarkowi. 'Sejarah Surulangun Sebagai Ibukota Onder Afdeling Rawas Tahun 1901-1942'. *AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA* 10, no. 1 (2020): 48–66.
- Swastiwi, Anastasia Wiwik, Sasangka Adi Nugraha, and Hendri Purnomo. *Lintas Sejarah Perdagangan Timah Di Bangka Belitung Abad 19-20*. Direktorat Jenderal Kebudayaan, 2017.
- Tondi, Muhammad Lufika, and Sakura Yulia Iryani. 'Nilai Dan Makna Kearifan Lokal Rumah Tradisional Limas Palembang Sebagai Kriteria Masyarakat Melayu'. *Langkau Betang: Jurnal Arsitektur* 5, no. 1 (2018): 15–32.
- Utama, Nanda Julian. 'Hegemoni Maritim Dan Militer Kerajaan Sriwijaya Di Kawasan Asia Tenggara Abad 7-10 M'. *Yupa: Historical Studies Journal* 5, no. 2 (2021): 78–90.
- Walle, Nicolas van de. 'The Party Paradox: A Comment Nicolas van de Walle (Cornell) February 20, 2018'. *Democratization* 25, no. 6 (2018): 1052–62.
- Woelders, Michiel Otto. 'Het Sultanaat Palembang 1811-1825: Een Bijdrage Tot de Studie van de Maleise Geschiedschrijving'. In *Het Sultanaat Palembang 1811-1825*. Brill, 2012.